

Penerapan Full Day School Perlu Memperhatikan Anggaran yang Proporsional

Rabu, 10-08-2016

MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, Prof. MaKhmun Syafe'i menilai konsep pendidikan *full day school* yang diwacanakan oleh pemerintah akan memiliki manfaat yang besar. Konsep ini, menurutnya, dapat memberikan kesempatan bagi pelajar atau siswa mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.

"Kesempatan anak-anak untuk main yang tidak jelas atau tidak karuan dan menghabiskan waktu itu, untuk yang tidak bermanfaat ini, bisa diarahkan," ujarnya saat ditemui Muhammadiyah.or.id, di Bandung, Selasa (9/8).

Guru Besar Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia ini mengatakan, sebenarnya sistem *full day school* ini bukanlah hal yang baru. Dari sistem itulah, terangnya, para siswa dapat menanamkan pendidikan karakter dan kreatifitasnya. "Karena akan ada satu kegiatan di luar yang biasa," ucapnya. Selain belajar setengah hari, para siswa dapat mengembangkan potensi dan bakatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Namun, Makhmun menambahkan, sistem *full day school* perlu memperhatikan anggaran yang proporsional. Ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang ada harus didistribusikan secara adil. Ini menimbang potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Memang, sambung dia, sistem *full day school* bisa diterapkan dengan baik di kota-kota yang sudah maju. Namun, bukan berarti, di daerah atau pedesaan, konsep ini tidak bisa diterapkan begitu saja.

Di sisi lain, Makhmun mengakui bahwa kondisi pedesaan kini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dan, kata dia, di luar itu, sebenarnya, terdapat beberapa hal di desa justru lebih maju dari kota, dan memang kemajuan ini tidak tersebar merata di setiap desa.

Tapi soal sistem *full day school* ini dibutuhkan kajian yang mendalam oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Banyak cara, menurutnya, untuk mengimplementasikan sistem *full day school*.

"Tentu sekarang di desa memang tidak bisa secara *simsalabim abrakadabra* seperti itu. Sekarang persoalannya ada pada komunikasi," katanya. "Perlunya kebijakan pendidikan, perlunya penganggaran secara proposional. Kebijakan itu berpihak pada pedesaan orang yang kecil, orang yang tidak mampu," jelasnya lagi.

Ihwal sistem *full day school*, Makhmun mengatakan, dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswi untuk mengerjakan tugas-tugas yang biasa dikerjakan di rumah, dilakukan di sekolah. Tentu, itu dilakukan sebelum mereka pulang ke rumahnya. Pekerjaan rumah atau lebih sering di sebut PR ini, menurut Makhmun, harus lebih ringan dari sebelum sistem *full day school* diberlakukan.

Makhmun pun menyarankan, agar PR yang diberikan oleh guru jangan terlalu sulit hingga siswa-siswi tidak mampu mengerjakannya. "Kalau pun di rumah, berikan PR yang tidak terlalu banyak. Ya satu sampai tiga," tutur dia mengenai banyaknya soal yang dapat dikerjakan anak setelah pulang sekolah.

Selain pendidikan yang diberikan kepada siswa, Makhmun menganggap, perlu juga memberikan

pelatihan dan peningkatan kualitas pengajaran bagi guru-guru agar dapat berpikir lebih maju. Hal ini dilakukan demi meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia.

Untuk menjadikan guru-guru lebih maju, ia berpendapat, perlu juga diperhatikan soal kesejahteraannya. "Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama," kata dia. Karena, menurut Makhmud, fungsi guru sangat menentukan pendidikan bangsa.

"Kalo gurunya juga kesejahteraannya masih tidak menggembirakan, mungkin ini sulit untuk kita *press*," ujar Mahmud menyoal peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia.

Reporter: Ilma Aghniatunnisa

Redaktur: Ridlo Abdillah